

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sebuah instansi dapat dipastikan memiliki kegiatan yang mengharuskan pegawainya untuk berpergian ke luar kota, ke luar provinsi atau bahkan keluar negeri guna menunjang kelancaran pencapaian tujuan kegiatan dari instansi tersebut. Kegiatan tersebut adalah perjalanan dinas. Bagi instansi pemerintahan perjalanan dinas diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan **Pasal 1 angka 16 Pergub Nomor 22 Tahun 2013** yang berbunyi: “Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan daerah”. Melakukan perjalanan dinas akan memerlukan banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh instansi tersebut. Oleh karena itu, akan ada upaya untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan administrasi perjalanan dinas. Upaya tersebut dengan cara memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas. Dalam pembebanan biaya perjalanan dinas yang berwenang untuk menetapkan tingkat biaya perjalanan dinas dan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas adalah PA/KPA. Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk perjalanan dinas, disesuaikan dengan pangkat dan golongan pegawai tersebut serta kota/kabupaten mana yang akan dituju dan berpedoman pada Keputusan Gubernur Nomor 910/Kep.711-Org/2015 tentang standar Biaya Belanja.

Biaya perjalanan dinas termasuk ke dalam pengeluaran kas. Kas merupakan asset dalam instansi yang paling likuid dan berada di urutan pertama dalam kelompok aktiva

lancar. Setiap perusahaan, baik perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan industri, atau instansi pemerintahan harus dapat mengelola kasnya dengan baik agar tidak terjadi gangguan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh instansi tersebut. Kas merupakan aktiva yang paling mudah diselewengkan, sehingga diperlukan suatu prosedur penatausahaan yang mengelola kas seperti prosedur penatausahaan pengeluaran kas yang mampu meminimalisir terjadinya tindak kecurangan dan penyelewengan serta meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan aktivitas suatu instansi.

Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat merupakan suatu organisasi pemerintah yang mengatur mengenai perumahan dan permukiman yang ada di Provinsi Jawa Barat. Dalam mencapai tujuan aktivitasnya, para karyawan Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat sering mendapatkan tugas ke luar lingkungan kantor atau yang disebut perjalanan dinas. Hal tersebut membuat seringnya terjadi transaksi pada pengeluaran kas untuk biaya perjalanan dinas atau yang disebut SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) di instansi tersebut, diantaranya biaya tiket pesawat, biaya tiket kereta api, biaya sewa kendaraan, biaya makan, uang harian, biaya penginapan, dan sebagainya. Oleh karena itu, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat memiliki prosedur mulai dari pengajuan belanja perjalanan dinas hingga penatausahaan belanja perjalanan dinas.

Dalam pelaksanaan transaksi pengeluaran kas, Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat menggunakan dua jenis buku berharga yaitu pengeluaran kas dengan buku cek dan pengeluaran kas dengan bilyet giro melalui pemindah bukuan penarikan tunai. Untuk pengelolaan kasnya berdasarkan usulan kebutuhan masing-masing bendahara pengeluaran pembantu, kemudian di rekap menjadi satu usulan dinas dan bendahara pengeluaran akan menerbitkan bilyet giro atau buku cek.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisa Prosedur Dalam Penatausahaan Pengeluaran Kas Atas Belanja Perjalanan Dinas Pada Dinas Perumahan Dan Permukiman Provinsi Jawa Barat"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana prosedur penatausahaan pengeluaran kas atas belanja perjalanan dinas pada Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah:

1. Mem peroleh data dan informasi yang diperlukan dari suatu instansi untuk kegiatan penelitian,
2. Mem peroleh gambaran nyata sistem akuntansi kas pada perusahaan
3. Membandingkan hasil dari teori yang di dapat di bangku kuliah dengan hasil dari pelaksanaannya di suatu instansi

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi:

1. Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang prosedur penatausahaan akuntansi khususnya prosedur penatausahaan akuntansi pengeluaran kas untuk biaya perjalanan dinas

2. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu informasi yang berguna untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas prosedur penatausahaan akuntansi pengeluaran kas biaya perjalanan dinas di instansi tersebut.

3. Pembaca

Sebagai pengetahuan bagi semua pihak yang akan melakukan penelitian yang berhubungan dengan tinjauan ini

1.5. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan studi kasus (*case study*) yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan masalah yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Penulis menentukan dan mencari data dari hasil wawancara dan data yang diperoleh langsung dari perusahaan yang bersangkutan. Data tersebut dideskripsikan dengan teori yang ada, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah untuk mengetahui kebenaran hipotesis yang diajukan. Untuk memperoleh data informasi yang dibutuhkan penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan yaitu meninjau langsung perusahaan yang diteliti, data yang diperoleh merupakan data primer. Studi lapangan ini dilakukan dengan teknik:

a. Observasi

Penulis mengamati langsung kegiatan di dalam perusahaan sehingga akan memperoleh data-data yang akurat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Wawancara

Penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada karyawan perusahaan sesuai dengan topik penelitian.

2. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan dimaksudkan memperoleh data sekunder untuk menunjang data primer yang di dapat dari penelitian lapangan. Dalam melakukan studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara:

- a. Membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- b. Membaca dan mempelajari materi perkuliahan serta bahan lain yang biasa dijadikan referensi.

1.6. Tempat dan Waktu Penelitian

1.6.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Kawalayaan Indah No. 4, Jatisari, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat 40286.

1.6.2. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian yang dilakukan yaitu selama tiga bulan, mulai dari bulan April 2018 sampai dengan bulan Juni 2018.